

BAB III

POSTUR DEMOGRAFI WNI DI GENERAL SANTOS, FILIPINA SELATAN

Bab ini penulis akan lebih spesifik untuk menjelaskan tentang kondisi masyarakat Indonesia di General Santos, Filipina Selatan yang mana terkena dampak dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait penangkapan serta penenggelaman kapal asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia.

Dengan dikeluarkan kebijakan dari pemerintah Indonesia yang mana kebijakan tersebut mendapat banyak pujian dari warga Indonesia sendiri dan membuahkan hasil yang bagus, dengan seiring tumbuhnya nilai ekspor dalam dunia perikanan Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang saudara kita rasakan yaitu orang Indonesia yang tinggal di Filipina Selatan tepatnya di General Santos. Kondisi masyarakat Indonesia yang tinggal di General Santos serta respon dari pemerintah Filipina pasca di terapkan kebijakan tersebut oleh pemerintah Indonesia dan juga daftar perusahaan apa saja yang berperan dalam aktivitas illegal fishing ini akan di jelaskan di bawah ini.

A. Sejarah Imigrasi WNI ke Filipina

1. Faktor Penyebab terjadinya Imigrasi

Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan imigrasi yaitu faktor pendorong dan faktor penarik (Push and Pull factor). Faktor pendorong (push factor): Semakin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan. Kemudian menyempitnya lapangan pekerjaan ditempat asal juga merupakan faktor pendorong. Adanya tekanan-tekanan politik, agama, suku, yang mengganggu hak asasi penduduk di tempat asal serta alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan. Faktor penarik (pull factor): Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup

yang menyenangkan juga merupakan faktor penarik dari penyebab seseorang melakukan imigrasi.

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong pertama yang ingin dijelaskan oleh penulis adalah kehadiran Belanda dan pemerintahan koloni Belanda di Indonesia. Keberadaan Belanda yang telah menjajah wilayah Indonesia selama berabad-abad telah memberikan dorongan kepada keturunan Indonesia yang tinggal di Mindanao Selatan saat ini. Itu memicu mereka untuk meninggalkan Hindia Belanda karena beberapa perlakuan tidak adil yang mereka dapatkan dari pemerintah kolonial.

Penulis akan menyoroti gagasan *Cultuurstelsel*, yang merupakan kebijakan tidak adil yang memberikan perlakuan tidak adil, yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan ini tidak adil karena aturan dari pemerintah Belanda mewajibkan 75% dari setiap panen diberikan kepada Belanda dan hanya 25% untuk orang-orang di Hindia Belanda. Selain itu, 20% dari tanah rakyat harus ditanami oleh tanaman tertentu seperti kopi dan tebu. Di sisi lain, orang yang tidak memiliki tanah harus bekerja minimal 75 hari setiap tahun.

Selain itu, kerugian lain yang dialami oleh orang-orang Hindia Belanda berkisar pada sistem pendidikan. Selama waktu itu, hanya elit, orang kaya dan keluarga kerajaan yang bisa bersekolah sementara sisanya tetap tidak berpendidikan. Selama waktu itu, sistem pendidikan adalah suatu kemewahan yang harus diperoleh. Kelangkaan sumber daya yang terjadi selama penjajahan Belanda juga merupakan salah satu kelemahan yang dialami oleh orang-orang Hindia Belanda. Selama penjajahan Belanda, sumber daya untuk kehidupan dasar seperti makanan yang layak sulit diperoleh, terutama selama masa "*cultuurstelsel*". Masalahnya pada saat itu menciptakan tingginya angka kelaparan di wilayah Hindia Belanda, dengan beberapa

tempat seperti Demak dan Grobogan mengalami penurunan jumlah orang (Firdausi, 2017).

Faktanya, Hindia Belanda adalah daerah yang sangat subur tetapi ketidaktahuan dari Pemerintah Kolonial Belanda menciptakan efek domino, karena Belanda hanya berfokus pada memaksa orang lokal untuk menanam perkebunan tanpa mempertimbangkan kondisi kehidupan para pekerja, yang pada argumen ini berkaitan dengan kesehatan dan ketahanan masyarakat setempat.

b. Faktor Penarik

Faktor Penarik yang ingin dijelaskan adalah tentang kedekatan geografis antara Sangir dan Pulau Talaud dengan Mindanao Selatan. Jarak tempuh dari Sangir dan Talaud ke Mindanao Selatan hanya membutuhkan tiga sampai lima hari dengan kapal layar, dan terbukti bahwa jarak antara pulau-pulau ini tidak terlalu jauh. Jarak antara pulau-pulau ini adalah 242 km yang akan mengambil penerbangan pesawat satu jam.

Faktor kedekatan menjadi faktor penarik bagi orang Sangir dan Talaud untuk bermigrasi ke Mindanao Selatan. Sangir dan Talaud adalah pelaut, dan laut yang terletak di antara pulau-pulau ini menjadi keuntungan mereka.

Dapat disimpulkan bahwa faktor geografis itu sah untuk menjadi salah satu faktor penarik. Bahwa manusia cenderung pergi ke tempat yang paling dekat terlebih dahulu sebelum mereka bepergian ke tempat yang lebih jauh. Dengan demikian, inilah alasan mengapa orang Sangir memilih untuk tinggal di Mindanao Selatan.

Iklim dan kondisi lingkungan yang serupa akan menjadi faktor penarik lain yang membawa Orang Sangir dan Talaud ke Mindanao Selatan, Filipina. Iklim Indonesia dan Filipina tidak jauh berbeda karena kedua negara adalah negara tropis. Karena itu, kedua lokasi tersebut memiliki banyak kesamaan, seperti perkebunan dan hasil laut. Kepulauan Sangir dan Talaud memiliki

kesamaan dengan Mindanao Selatan di sektor pertanian yang memungkinkan orang untuk beradaptasi dengan cepat.

Lingkungan sosial di Mindanao Selatan tidak jauh berbeda karena penampilan fisik masyarakat relatif mirip dengan keturunan Indonesia yang tinggal di Mindanao Selatan. Dengan demikian, mereka tidak menghadapi diskriminasi signifikan dari penduduk asli. Cara hidup juga tidak jauh berbeda karena pekerjaan khas orang-orang pantai adalah seorang nelayan. Dengan demikian mereka dapat melanjutkan cara hidup mereka dengan menjadi nelayan. Orang-orang Mindanao Selatan menyambut agama apa pun, yang dibuktikan dengan cara mereka tidak melawan Spanyol yang sebagian besar beragama Katolik. Ini berarti bahwa orang Sangir tidak akan menghadapi diskriminasi, apa pun agama yang mereka anut.

Orang Sangir telah melihat bahwa peluang ekonomi ditawarkan di Mindanao Selatan karena selama gelombang migrasi sebelumnya ke Mindanao Selatan, situasi kembali ke wilayah Hindia Belanda termasuk Sangir Talaud tidak menyenangkan. Rakyat Sangir dan Talaud hanya mendapat sedikit peluang di pasar dan bahkan memiliki harga yang tidak adil selama proses penjualan karena Belanda memberikan harga yang tidak adil kepada penjual lokal. Perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya menjadi salah satu faktor penarik untuk pergi ke Filipina.

Peluang ekonomi yang ditawarkan di Mindanao Selatan menjanjikan karena mereka tidak akan menghadapi perlakuan tidak adil dalam perdagangan karena Mindanao Selatan yang pada waktu itu dijajah oleh Spanyol dan Amerika tidak sama dengan Belanda. Situasi di sana bagus karena mereka dapat memiliki perdagangan yang adil dan mendapatkan harga yang adil. Pertanian dan akuakultur benar di Mindanao Selatan, dan itu menjadi poin yang tepat untuk orang

Sangir dan Talaud karena pekerjaan sehari-hari dari Sangir dan Talaud adalah nelayan dan petani.

Akuakultur mendukung orang-orang Sangir dan Talaud untuk mengembangkan tahap ekonomi mereka karena ketika mereka pergi ke Mindanao Selatan, mereka paling sering tinggal di pantai dekat pantai, sehingga membuat mereka lebih mudah untuk menjalankan bisnis mereka sebagai nelayan. Di sisi petani tanah dari Mindanao Selatan tidak terlalu berbeda dengan tanah di Sangir dan Talaud, dan kebanyakan petani menanam kopra, dan beberapa buah seperti Durian dan tanaman itu mudah ditanam. Situasi itu membuat petani yang tinggal di Mindanao Selatan tidak menghadapi penyesuaian besar dari tempat mereka sebelumnya di Sangir dan Talaud untuk melanjutkan cara hidup mereka setelah migrasi.

Faktor penarik migrasi Sangir dan Talaud juga karena ada hubungan historis antara Kesultanan Ternate dan Mindanao Selatan. Kesultanan sudah berdiri sejak abad ke-13 tepatnya tahun 1257 pada waktu itu masih disebut sebagai Moluku kie Raha. Sementara itu, perkembangan Kesultanan Ternate pada abad ke-16 masalah muncul ketika Portugis datang ke daerah Ternate. Rakyat Ternate mulai memerintah perjuangan mereka untuk memberhentikan Portugis. Pada 1580, Spanyol dan Portugis bergabung untuk menyerbu Ternate dan menanggapi hal itu, Ternate menanggapi dengan tindakan memiliki sekutu. Ternate menciptakan sekutu dengan Mindanao pada waktu itu untuk membubarkan Spanyol, tetapi mereka telah gagal, dan Sultan Said Barakati tertangkap.

Hubungan historis antara orang-orang di dekat Sulawesi dan Maluku tetap kuat bahkan setelah kegagalan dalam tindakan melawan Spanyol. Hubungan fungsional antara mereka dengan daerah Mindanao menjadi salah satu faktor penarik Migrasi orang Sangir dan Talaud. Orang Sangir dan Talaud berbaik hati

bermigrasi ke Mindanao Selatan bukan karena hanya didasarkan pada faktor ekonomi atau kedekatan geografis antara pulau-pulau ini.

Ikatan sosial-budaya dari sejarah keturunan Indonesia juga menjadi salah satu faktor penarik yang ingin dijelaskan oleh penulis. Orang Indonesia sudah bermigrasi ke Filipina sejak era kerajaan di Indonesia. Para pelaut awal keturunan Indonesia yang berasal dari Kekaisaran Sriwijaya pergi ke daerah Visayas, yaitu Cebu. Ada juga beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa nama Bisaya, yang merupakan bahasa utama orang Mindanao, berasal dari kata Wijaya atau Sriwijaya (Putri R. G., 2013).

B. Demografi WNI di General Santos, Filipina Selatan

Negara Filipina menjadi urutan ke-12 di dunia dalam jumlah angka penduduk sebanyak 86,241,697 jiwa pada tahun 2005. Sebanyak dua per tiga penduduk yang tinggal di pulau Luzon dan Manila, dan ibu kotanya sendiri berada di urutan ke-11 dalam jumlah penduduk kota besar. Masyarakat Filipina terbagi dalam 12 kelompok etnolinguistik yang terbesar merupakan Tagalog, Cebuana, dan Ilocano, sedangkan penduduk asli dari Filipina berasal dari suku Aeta dan memiliki populasi sebanyak 30 jiwa. Filipina memiliki tiga etnis asing terbesar yaitu orang Tionghoa, Amerika, dan Asia Selatan, selebihnya dating dari Arab, Eropa, Indonesia, Korea, dan Jepang. Orang-orang suku Mestizo adalah minoritas sebesar 1-2% yang berpengaruh (Subarkah, 2016).

Tercatat ada 8.745 keturunan Indonesia yang telah terdaftar di Mindanao Selatan tetapi hanya 2.425 yang akhirnya terdaftar sebagai keturunan Indonesia. Negara masih merupakan pemain utama yang selalu dibutuhkan masyarakat. Di situlah semua pihak akan bergantung dan berlindung untuk semua pihak yang terjadi. Itulah yang dilakukan orang-orang di Indonesia yang berisiko menjadi kewarganegaraan di Mindanao. Status kewarganegaraan yang tidak jelas menumbuhkan pertanyaan baru di Mindanao. Di sini mereka, harus disetujui.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina tidak hanya diam, mereka terus berusaha untuk melegalkan populasi mereka. Pemerintah Indonesia dalam proses legalisasi terus melakukan upaya untuk membuat kebijakan terhadap keturunan Indonesia di Mindanao Selatan mendapat data pribadi hukum.

Kependudukan masyarakat Indonesia yang berada di Filipina Selatan, migrasi orang Indonesia ke pantai Filipina yang berawal sejak abad ke-17, dengan gelombang besar pertama diaspora terjadi pada awal tahun 1900-an. Perbatasan maritim berpeluang dan kedekatan pantai Mindanao menyebabkan banyak orang Indonesia menjadi anggota kelompok Sangir dan Marore dari Sulawesi Utara di Indonesia untuk pindah ke Kepulauan Balut dan Saranggani di provinsi Davao del Sur yang berada di Filipina Selatan. Kesamaan sosio-budaya dengan komunitas etnis Mindanao termasuk hubungan etnolinguistik dan jaringan keluarga dan sosial memperkuat pengembangan komunitas "transnasional" di banyak bagian Mindanao pada waktu itu (Manigbas, 2016).

Keturunan dari para migran Indonesia ini (diidentifikasi sebagai Masyarakat Keturunan Indonesia) saat ini berada di beberapa provinsi yakni provinsi Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Saranggani, Sultan Kudarat, Cotabato Utara, Cotabato Selatan, kota-kota dari General Santos dan Davao yang berada di Filipina. Sikap orang Indonesia yang mana orang tuanya datang ke Mindanao pada tahun 1930-an tetapi mereka tidak berbicara bahasa Indonesia atau mengenal kerabat di Indonesia, mungkin benar bagi banyak orang Indonesia lainnya di wilayah tersebut. Mereka tetap mempertahankan identitas bahwa mereka adalah orang Indonesia akan tetapi mereka menyebut bahwa Filipina ialah rumah bagi mereka (Kidapawan, 2016).

Warga Indonesia sendiri yang tinggal di pulau Mindanao pada umumnya berasal dari pulau-pulau yang berada di sekitar kepulauan Sangihe dan Talaud, Sulawesi Utara. Cepatnya aktivitas nelayan yang berkembang dari tahun 1950-an menyebabkan terjadinya interaksi antara warga Indonesia dan

warga Filipina, lalu sebagian dari nelayan tersebut memilih untuk tinggal di Mindanao.

Pada fase kedua orang Indonesia yang menyusul ke Filipina mereka menjadi tukang kebun dan buruh pemetik buah kelapa, aktivitas tersebut terus berkembang hingga saat ini. Berdasarkan perkiraan jumlah penduduk Indonesia menurut pemerintah Filipina yaitu sebanyak 53.000 jiwa, sedangkan menurut Kementerian Luar Negeri RI memperkirakan jumlahnya yaitu 15.000 jiwa. Lalu banyak dari WNI yang menikah dengan warga lokal di Mindanao, dari situ pemukiman mereka berkembang dengan pesat di sejumlah perkebunan kelapa atau nanas yang jauh dari kota-kota besar seperti kota besar Davao ataupun General Santos di pulau Mindanao, Filipina Selatan (Harijono, 2012).

Masyarakat Indonesia yang berada di Filipina ini berisiko menjadi warga negara tanpa kewarganegaraan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa kewarganegaraan Indonesia akan hilang karena kegagalan untuk menyatakan niat untuk mempertahankan kewarganegaraan dalam lima tahun hidup di luar Indonesia. Undang-undang kewarganegaraan Indonesia tahun 2006 mempertahankan aturan yang sama akan tetapi mengizinkan perolehan kembali kewarganegaraan Indonesia. Namun, rekuisisi kewarganegaraan harus dilakukan dalam waktu tiga tahun sejak dikeluarkannya undang-undang 2006 (DPR-RI, 2006).

Kewarganegaraan Indonesia juga hilang karena kepemilikan paspor asing, dokumen perjalanan, atau kartu identitas nasional. Banyak orang Indonesia yang tinggal di Mindanao memiliki kartu identifikasi Asuransi Kesehatan Filipina (PhilHealth), sebuah dokumen yang dikeluarkan pemerintah Filipina. Meskipun hanya orang Filipina yang seharusnya memiliki kartu-kartu ini, orang-orang Indonesia dapat memperoleh kartu PhilHealth karena prosedur pemrosesan yang lunak. Partisipasi sukarela dalam pemilihan asing juga merupakan alasan untuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Sementara hak untuk memilih dalam pemilihan Filipina adalah

eksklusif untuk warga negara Filipina, banyak orang Indonesia telah terdaftar sebagai pemilih dengan Komisi Pemilihan Filipina (COMELEC) dan telah berpartisipasi dalam pemilihan.

Dengan akses yang sangat sedikit terhadap informasi tentang hak-hak mereka dan sedikit atau tidak ada sumber daya keuangan, banyak orang Indonesia telah gagal memenuhi persyaratan dalam mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atau dalam memperolehnya kembali, meninggalkan status hukum mereka dalam keadaan limbo. Tanpa kebangsaan, mereka tidak dapat menikmati hak asasi manusia mereka, termasuk: hak atas kebebasan bergerak; pendidikan formal; akses ke layanan sosial; dan memiliki properti. Mereka sering memiliki akses yang buruk ke layanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan tinggi yang terjangkau (Philippines, 2016).

C. Status Sosial dan Kewarganegaraan WNI di General Santos, Filipina Selatan

Data resmi dari konjen RI Davao menyebutkan ada sekitar 15.000 – 22.000 WNI yang tinggal di pulau Mindanao, Filipina Selatan. Sebagian besar dari mereka tinggal di provinsi Saranggani yang mana pada pemilu tahun 2014 ada sekitar 6.500 pemilih WNI dari Mindanao. Meski hal ini dianggap legal banyak WNI dianggap tidak jelas kewarganegaraannya, hal itu di karenakan mereka yang sekarang merupakan keturunan generasi ketiga yang tinggal di Mindanao.

Kampung Quilantang atau yang mereka sebut sebagai kampung Indonesia memiliki 700 kepala keluarga dan mereka pun masih bingung untuk menetapkan akankah menjadi warga negara Filipina ataupun Indonesia.

Jauh sebelum munculnya kebijakan penangkapan dan penengggelaman kapal asing oleh pemerintah Indonesia, hampir 90% WNI yang tinggal di General Santos memiliki pekerjaan sebagai nelayan, banyak dari mereka yang menjadi anak buah kapal dari perusahaan yang ada di Filipina, serta kehidupan yang layak di rasakan oleh WNI di bandingkan warga lokal yang tinggal di General Santos, Filipina Selatan (Hanifan, 2017).

Fenomena stateless merupakan sebuah fenomena yang telah mengglobal seperti halnya dunia yang mengglobal saat ini. Fenomena ini dapat ditemui di beberapa negara, seperti yang terjadi di Filipina tepatnya di Pulau Mindanao, Filipina Selatan. Di daerah tersebut ditemui para masyarakat keturunan Indonesia yang menetap lama di Mindanao yang beresiko kehilangan kewarganegaraan Indonesianya dan menjadi stateless. Kondisi Masyarakat Keturunan Indonesia di Mindanao. Berdasarkan sejarah kedatangannya, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao datang dan masuk ke wilayah Filipina melalui cara-cara tradisional. Masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao keluar wilayah Indonesia dan masuk ke Filipina hanya menggunakan transportasi sederhana dan dengan aturan yang tidak resmi pula dalam melewati batas-batas negara. Untuk itu, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao kerap dikategorikan sebagai “illegal entrance”. Status “illegal entrance” yang disandang disebabkan karena mereka keluar masuk wilayah Indonesia dan Filipina tanpa memiliki dokumen resmi perjalanan luar negeri, seperti yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara di dunia. Indonesia sesuai peraturan keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan diikuti oleh Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 mewajibkan setiap warga negaranya untuk memiliki paspor sebagai surat ijin keluar masuk wilayah Indonesia.

Tidak adanya dokumen ijin keluar dari wilayah Indonesia dan masuk ke wilayah Filipina secara tradisional, maka posisi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao di mata pemerintah Filipina menjadi penduduk yang tidak terdokumen atau biasa disebut dengan istilah “undocumented citizens”. Berstatus sebagai “illegal entrance” dan berbuntut dengan status “undocumented citizens” telah memposisikan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao di posisi yang sangat buruk di Filipina.

Posisi yang sangat buruk disimpulkan berdasarkan fakta di lapangan yang harus dihadapi oleh masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Kesulitan yang dihadapi bisa datang dari berbagai aspek, seperti ekonomi, status hukum, sosial,

pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dalam aspek ekonomi, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao memiliki pekerjaan yang menetap namun dengan pendapatan yang tidak menetap. Mayoritas masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao bekerja sebagai petani kopra dan nelayan (Subagja, 2016).

Pada tahun 2018 Kementerian Republik Indonesia ternyata memberikan kabar gembira bagi para WNI yang tinggal di Filipina, kabar tersebut berisikan bahwa sebanyak 590 WNI akan mendapatkan status kewarganegaraan secara simbolik. Setelah diberikannya status kewarganegaraan tersebut maka langkah selanjutnya pemerintah akan mendata secara keseluruhan. Pada awal juni 2018 Kementerian Luar Negeri Indonesia telah memproses sebanyak 775 permohonan paspor milik WNI di Mindanao dan setelahnya KEMNLU telah memberikan 16 paspor secara simbolis kepada 16 perwakilan dari masing-masing daerah pada Hut RI ke-73 (Liputan6.com, 2018).

Demi mengatasi masalah kemiskinan yang di hadapi oleh para WNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri Indonesia bekerja sama membangun pendidikan untuk WNI yang berada di Filipina dengan di bangunnya beberapa pusat pembelajaran atau *learning center* di beberapa titik kawasan pemukiman WNI, seperti di Tupi, Laensasi, Isulan, Magdub, Kuilantang, dan Balunto, Pulau Mindanao. Pada umumnya pemukiman para WNI tersebar area perkebunan kelapa dan nanas sehingga sekolah ini terbuka untuk umum dan semua usia bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah tersebut (Harijono, 2012).

Perjuangan ini juga di rasakan oleh para guru honorer yang berada di Filipina. Gaji yang sedikit menjadi salah satu beban bagi mereka, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk terus mengajar kepada WNI yang berada disana yang mana banyak peserta didik atau para siswa tidak mengerti dengan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sendiri melainkan bahasa Tagalog yaitu bahasa setempat (Setiawan, 2012).

Sekolah Indonesia di Davao Filipina pertama berdiri pada tanggal 27 Agustus 1968 dan pada tanggal 14 Juli 1987 Sekolah Indonesia Davao telah memiliki gedung permanen (milik pemerintah RI / KJRI Davao *city*) yang berlokasi di Melati St. Ecoland Ph IV, Ecoland Subd, Matina, Davao *city*.

Bangunan SILN ini terdiri dari 2 lantai dan merupakan satu satunya SILN yang memiliki asrama dengan kapasitas menampung 40 siswa untuk siswa putra dan 40 untuk siswi wanita. Keberadaan SILN termasuk asrama di dalamnya sangatlah penting mengingat bahwasanya masyarakat Indonesia yang sekolah di SILN memiliki tempat tinggal yang jauh dari sekolah seperti di General Santos City dan di Pulau Balut maupun Sarangani (Gunawan, 2019).

D. Status Ekonomi WNI di General Santos, Filipina Selatan

Jauh sebelum di perketatnya masalah *illegal fishing* di perairan Indonesia, banyak dari WNI yang tinggal di General Santos, Filipina Selatan yang kehidupannya bergantung pada hasil tangkapan laut. Tidak sedikit dari WNI yang menjadi nelayan maupun anak buah kapal dari perusahaan ikan yang berada di Filipina, hasil dari laut yang mereka dapatkan sudah lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan sehari – hari.

Banyak dari WNI yang bekerja di perusahaan – perusahaan ikan di Filipina seperti RD Group of Companies, Amadeo Fishing, Atlantis Fishing Industries, Citra Mina Group of Companies, Frabelle Fishing Corporation, General Tuna Canning Corporation, Philbest Canning Corporation, RD Tuna Ventures Inc, dan juga San Andres Fishing Industries Inc. Perusahaan – perusahaan ikan tersebut berlokasi di salah satu dermaga di General Santos, kementerian tenaga kerja Filipina menyebutkan bahwa industri tuna memperkerjakan lebih dari 200.000 orang dan diantara terbagi menjadi nelayan dan sebagian dari mereka bekerja di pabrik pengolahan ikan (Hanifan, 2017).

Konsul Jendral RI Davao City Berlian Napitupulu melakukan pertemuan khusus dengan Senator Manny Pacquiao dalam hal dalam memajukan perekonomian General Santos.

Pertemuan ini di harapkan dapat menghasilkan hasil yang baik dan juga menjadi lapangan pekerjaan baru bagi warga Indonesia yang kehilangan pekerjaan akibat dari dampak di perketatnya keamanan dalam aktivitas *illegal fishing* di perairan Indonesia. Pertemuan ini membahas tentang pembukaan jalur perdagangan dan perhubungan laut antara General Santos City, Glan dan Manado dan menurut Konsul Jendral RI Davao City Berlian Napitupulu akan berjalan dengan baik karena akan di tambahnya rencana peluncuran jalur laut RoRo (Roll on – Roll off) antara Davao, Gensan, dan Bitung (Prasetyo, 2017).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Dalam pertemuan tersebut, menteri luar negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa meningkatkan konektivitas ini akan semakin membuka pintu perdagangan dan mendorong kegiatan usaha meningkat dari kedua negara, terutama masyarakat setempat. Sampai sekarang, total perdagangan antara Indonesia dan Filipina telah meningkat sebesar 22% pada 2017 dengan total nilai US \$ 7,48 milyar. Sementara di sektor investasi, kedua negara mengeksplorasi potensi ekonomi mereka masing-masing (Kemenlu).

E. Kesimpulan

Pada bab kali ini penulis mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya proses imigrasi antara orang Sangir dan Talaud ke daratan Filipina seperti faktor jarak yang tidak terlalu jauh untuk ditempuh, geografi, serta dorongan saat kehadiran kolonial Belanda yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi orang Indonesia yang tinggal di Pulau Sangir dan Talaud. Setelah berimigrasi ke Filipina terbentuklah sebuah tempat untuk bermukim yang kita kenal sekarang yaitu Kampung Quilantang yang disebut – sebut sebagai Kampung Indonesia. Demi memenuhi kebutuhan hidup disana para WNI bekerja sebagai nelayan ataupun bekerja pada perusahaan kapal ikan, banyak dari mereka yang menjadi anak buah kapal yang mana pendapatannya lumayan dibanding dengan warga lokal.